

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah yang tersaji, hasil penelitian ini menyajikan gambaran rinci tentang logistik dan pengadaan terkait proses pemilu yang akan datang di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Penelitian ini dimulai dengan menguraikan kebutuhan spesifik untuk berbagai kebutuhan logistik dan bahan lain yang diperlukan untuk pemilu, mencerminkan tingkat persiapan yang dibutuhkan untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara supaya berjalan lancar. Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan dalam BAB 1 maka kesimpulan yang dapat disajikan ialah.

1. Pelaksanaan *e-purchasing* dalam pengadaan logistik Pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan upaya untuk menerapkan prinsip efisiensi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data yang tersedia, efisiensi biaya tercapai pada beberapa item logistik, seperti kotak suara yang mencapai efisiensi 58,94% dengan penghematan sebesar Rp22,9 miliar, tinta dengan efisiensi 45,15% (penghematan Rp1,9 miliar), dan bilik pemungutan suara yang mencapai efisiensi 36,80% (penghematan Rp4,2 miliar). Namun, terdapat juga ketidakefisienan pada item tertentu, seperti segel yang mengalami pemborosan sebesar 8,76% atau kerugian sekitar Rp349 juta. Selain itu, efisiensi waktu belum sepenuhnya tercapai karena

terdapat keterlambatan dalam distribusi logistik, seperti yang terlihat dalam Tabel 3. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip efisiensi telah diterapkan pada aspek biaya untuk sebagian besar logistik, masih diperlukan perbaikan dalam hal waktu dan konsistensi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

2. Kendala utama dalam pelaksanaan *e-purchasing* di KPU Provinsi Jawa Tengah meliputi keterlambatan distribusi logistik ke daerah, yang disebabkan oleh koordinasi yang kurang optimal dengan penyedia. Selain itu, ketidaktepatan perencanaan pada item tertentu, seperti segel, menyebabkan pemborosan anggaran. Sistem SILOG, meskipun telah digunakan untuk memantau proses pengadaan, masih memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi real-time tentang progress pengadaan. Ketergantungan pada metode konsolidasi nasional juga menjadi tantangan, karena kesalahan dalam pemilihan penyedia dapat berdampak pada ketidakefisienan secara keseluruhan. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun *e-purchasing* telah diterapkan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal koordinasi, perencanaan, dan penggunaan teknologi.
3. Solusi dari kendala tersebut, beberapa solusi dapat diimplementasikan. Pertama, perbaikan koordinasi dengan penyedia melalui sistem kontrak yang lebih ketat dan pemberian sanksi untuk keterlambatan dapat membantu meminimalkan risiko keterlambatan distribusi. Kedua, evaluasi kebutuhan logistik secara detail sebelum pengadaan, terutama

untuk item yang berisiko boros seperti segel, dapat mencegah pemborosan anggaran. Ketiga, peningkatan kapasitas sistem SILOG dengan integrasi fitur real-time tracking dan pelaporan otomatis akan memudahkan monitoring dan supervisi, sehingga keterlambatan dapat diidentifikasi dan ditangani lebih cepat. Keempat, pelatihan intensif bagi staf pengadaan terkait penggunaan *e-purchasing* dan analisis HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dapat meningkatkan akurasi perencanaan dan menghindari kesalahan. Terakhir, optimalisasi metode non-konsolidasi untuk item tertentu dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan memastikan bahwa pengadaan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pelaksanaan *e-purchasing* di KPU Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan kemajuan dalam mencapai efisiensi biaya, tetapi masih perlu penyempurnaan dalam aspek waktu, konsistensi, dan teknologi pendukung. Dengan menerapkan solusi-solusi yang tepat, prinsip efisiensi dapat dioptimalkan untuk Pemilu 2024 dan seterusnya, sehingga proses pengadaan logistik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

B. Saran

1. Mengoptimalkan perencanaan pengadaan barang/jasa logistik kepemiluan di pemilu-pemilu yang berikutnya supaya pelaksanaan dapat berjalan lebih lancar dan dapat mengantisipasi pengadaan yang terburu-buru. Oleh karena itu idealnya dalam satu tahun terdapat dua pemilu saja supaya tahapan dan perencanaan pengadaan dapat berjalan dengan sistematis, tidak seperti tahun 2024 yang terdapat dua kali

pemilu, yaitu Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah 2024. KPU Provinsi Jawa Tengah harus terus memiliki upaya mitigasi dalam upaya pencegahan kesalahan dalam perencanaan logistik pemilu.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga penting dengan memberikan pelatihan intensif terkait teknologi dan manajemen logistik modern kepada staf KPU. Pengamanan sistem melalui firewall, enkripsi, dan backup data berkala harus diterapkan untuk mencegah gangguan teknis dan siber. Selain itu, perlu dibentuk tim pengawas khusus untuk memonitor kinerja server dan SILOG secara real-time, serta melakukan evaluasi rutin untuk perbaikan berkelanjutan. Kerjasama dengan konsultan teknologi dan penyedia logistik profesional dapat mendukung implementasi solusi teknis yang lebih efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan kendala teknis dapat teratasi dan sistem pengawasan logistik menjadi lebih sistematis dan efisien.
3. Terkait pengadaan, proses seleksi penyedia barang dan jasa harus diperketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja masa lalu (track record) serta melakukan verifikasi administrasi dan teknis secara mendalam. Penyedia harus memenuhi standar tertentu, termasuk kemampuan teknis, kapasitas operasional, dan komitmen terhadap waktu pengiriman. Transparansi dalam proses seleksi juga perlu dijaga dengan melibatkan tim evaluasi independen dan menggunakan platform digital untuk meningkatkan akuntabilitas.

Dengan langkah ini, KPU dapat memastikan bahwa penyedia yang dipilih mampu memenuhi kebutuhan pengadaan secara optimal, sehingga risiko keterlambatan atau kegagalan pengiriman logistik dapat diminimalkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, R. (2014). *Aspek hukum pidana dalam PBJP*. LKPP.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- International Foundation for Electoral Systems. (n.d.). *What is an election?*
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Pemilihan Umum Serentak 2019*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). *Kamus istilah pemilu*.
- Lambert, D. M., Stock, J. R., & Ellram, L. M. (2011). *Fundamentals of logistics management*. McGraw-Hill Education.
- LKPP. (2009). *Substansi pengadaan barang dan jasa: Buku II*.
- Lubis, A. S. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Lembaga Pengembangan Insan Indonesia.
- Machmudin, D. D. (2003). *Pengantar ilmu hukum*. Refika.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics*. Cengage Learning.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Murphy, P., & Wood, D. (2011). *Contemporary logistics*. Pearson Education.
- Ridwan, H. R. (2002). *Hukum administrasi negara*. UII Press.
- Siahaya, W. (2012). *Manajemen pengadaan, procurement management*. Alfabeta.

Trochim, W. M., Donnelly, J. P., & Arora, K. (2015). *Research methods: The essential knowledge base*. Cengage Learning.

United Nations Development Programme. (n.d.). *Handbook on electoral management design*.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan KPU, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116

Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485

Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman PBJP melalui Penyedia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1286

Website

- M. Hidayat, Revitalisasi Pemanfaatan *E-Procurement* dalam Pemenuhan Logistik Pemilu (Sukses Pengadaan, Sukses Penyelenggaraan), <https://justitiatraining.co.id/berita-terkini/articles/revitalisasi-pemanfaatan-e-procurement-dalam-pemenuhan-logistik-pemilu/>, diakses pada 6 Oktober 2024
- Sevilla, Efisiensi: Pengertian, Konsep, Jenis, Manfaat, dan Tolak Ukurnya, <https://www.gramedia.com/best-seller/efisiensi/>, diakses pada 7 Oktober 2024
- La Bastian, Apa itu E-Katalog dan Proses Pembelian Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing*, <https://bpbj.sbbkab.go.id/read/5/apa-itu-e-katalog-dan-proses-pembelian-barangjasa-melalui-e-purchasing>, diakses pada 13 Oktober 2024
- Annisa, Pengertian Pemilu Fungsi dan Prinsip, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>, 21 Mei 2024 Hal. 1, diakses pada 12 Oktober 2024

Jurnal

- ACE Electoral Knowledge Network. (2021). *"Logistics in Elections."* aceproject.org.
- Daft, R. L., & Marcic, D. Understanding Management. Cengage Learning, 2015
- Flynn, A., & Davis, P. (2017). *"Explaining SME Participation and Success in Public Procurement Using a Capability-Based Model of Tendering."*

Journal of Public Procurement, 17(3), 337-372.

Muhammad Irawan Adi Hartono, 2022, "Implementasi *E-Procurement* Logistik Sebagai Efisiensi Anggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020", *Jurnal Moderat*, Vol. 8/No. 3, Universitas Lampung, hlm 501.

Sovacool, B. K. "Conceptualizing Urban Household Energy Use: Climbing the 'Energy Services Ladder'." *Energy Policy*, vol. 37, no. 11, 2009, pp. 4293–4301.)

Lain-Lain

Hasil wawancara dengan Drs. Basmar Perianto A., M.M selaku Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah

Hasil wawancara dengan Bapak Eko Supriyono., S.Kom. selaku kepala bagian Keuangan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah